



PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik. Renstra ini menjadi instrumen perencanaan yang memuat arah pembangunan Sekretariat Daerah selama lima tahun, disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2025–2029 serta memperhatikan perkembangan pembangunan daerah dan nasional.

Sebagai pembantu pemimpin daerah, Sekretariat Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran tugas kepala daerah dan perangkat daerah lainnya. Oleh karena itu, Renstra disusun dengan semangat integrasi dan sinergi untuk meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini menjadi acuan kerja yang terarah dan berkelanjutan bagi seluruh jajaran Sekretariat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin responsif dan adaptif dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

Muara Sabak, 11 November 2025

Sekretaris Daerah,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' followed by a long, sweeping horizontal stroke that curves upwards at the end.

H. Sapril, S.IP.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	11
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	18
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.1.2 Kelompok Sasaran Layanan.....	26
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	27
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.2.2 Isu Strategis	29
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	33
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029	33
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029	34
3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029	34
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029	37
BAB IV PROGRAM KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
BIDANG URUSAN	39
4.1 Uraian Program	39
4.2 Uraian Kegiatan	62
4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif ..	63

4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas	
Pembangunan Daerah	87
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat	
Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	
Perangkat Daerah	90
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun	
2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	91
BAB V PENUTUP.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur .	12
Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah	33
Gambar 3.2 Kerangka Ketertarikan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	34
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan	18
Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan.....	20
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	21
Tabel 2.4 Reviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	23
Tabel 2.5 Realisasi dan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2021 - 2025	24
Tabel 2.6 Kelompok Sasaran Layanan.....	26
Tabel 2.7 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	30
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	36
Tabel 3.2 Penahanan Renstra Perangkat Daerah.....	37
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	38
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	43
Tabel 4.2 Uraian Kegiatan	62
Tabel 4.3 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan	64
Tabel 4.4 Uraian Subkegiatan	87
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama	91
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan suatu proses perubahan dan pembaharuan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh pemerataan hasil pembangunan serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam prosesnya. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengarahkan pembangunan agar selaras dengan kebutuhan riil masyarakat serta dinamika yang terus berkembang.

Berbagai capaian pembangunan yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi fondasi kuat untuk melangkah lebih maju. Keberhasilan tersebut mencerminkan komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempertahankan dan memperkuat capaian itu, diperlukan perencanaan yang terarah, menyeluruh, dan partisipatif agar potensi daerah dapat dimaksimalkan menuju pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan visi pembangunan lima tahun ke depan, yaitu “Membangun Bersama Rakyat untuk Sejahtera dan Bahagia (MERATA).” Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, disusun RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029 sebagai pedoman arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya, RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) oleh setiap perangkat daerah sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode tersebut.

Sekretariat Daerah sebagai unsur utama dalam mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah, memiliki fungsi strategis dalam hal koordinasi pemerintahan, pelayanan administratif, serta fasilitasi penyelenggaraan pembangunan lintas sektor. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029 menjadi bagian integral dari upaya mendukung keberhasilan visi dan misi kepala daerah.

Renstra ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada ketentuan teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Dokumen ini disusun secara sistematis, terukur, dan responsif terhadap tantangan pembangunan dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan kondisi faktual daerah.

Melalui dokumen ini, diharapkan Sekretariat Daerah dapat melaksanakan perannya secara optimal dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, serta pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sejahtera dan bahagia (MERATA).

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029 dilakukan dengan berlandaskan pada ketentuan hukum, perundang-undangan, dan peraturan pendukung lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. PERDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11) telah diubah dengan PERDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PERDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3);
17. PERDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
18. PERDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 4);
19. PERDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 Nomor 1);
20. PERBUP Tanjung Jabung Timur No. 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 No. 11) telah diubah dengan PERBUP Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur No. 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 3) .

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2025–2029 bertujuan untuk menghadirkan dokumen perencanaan teknis lima tahunan sebagai turunan dari dokumen RPJMD Kabupaten. Renstra ini merupakan landasan penting dalam menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam arah kebijakan yang terukur dan sistematis, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mendukung pembangunan yang MERATA di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Secara umum, maksud dari penyusunan Renstra ini adalah:

- a. Menyediakan dokumen rencana strategis lima tahunan yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menjadi acuan strategis bagi Sekretariat Daerah dalam merumuskan arah kebijakan, sasaran, dan program prioritas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan serta dasar masukan untuk penyusunan RKPD, KUA, dan PPAS dengan pendekatan kinerja yang terukur.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam setiap tahun anggaran selama periode lima tahun.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2025–2029 ini adalah:

- a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2025–2029 menjadi visi, misi, program, dan kegiatan perangkat daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- b. Menetapkan target kualitatif organisasi yang bersifat terukur, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pelaksanaan program (penganggaran berbasis kinerja).
- c. Mempermudah penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, seperti laporan realisasi anggaran tahunan, LKjIP, serta memberikan masukan bagi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati dan Wakil Bupati selama masa jabatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029 disusun secara sistematis dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025–2029
- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun 2025–2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
- 4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun 2025–2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025–2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan perangkat daerah disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai peran, fungsi, dan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang diamanatkan. Penyajian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana perangkat daerah mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pencapaian visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah.

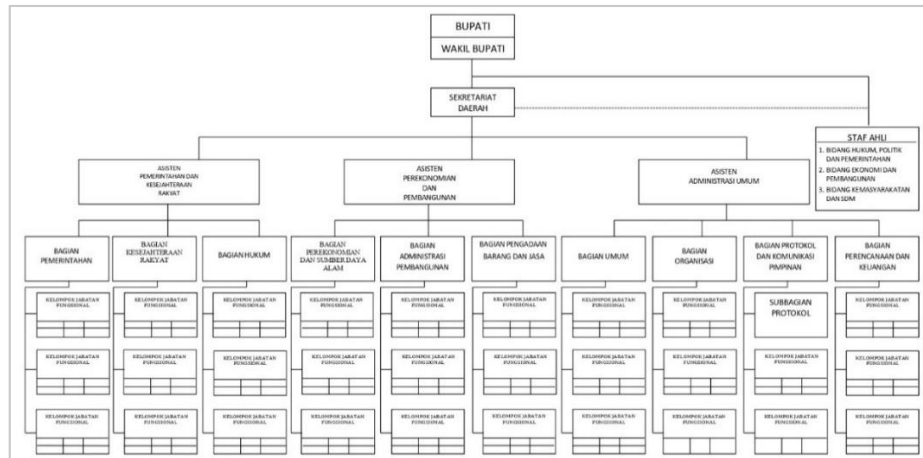
Uraian gambaran pelayanan perangkat daerah mencakup aspek kelembagaan, kapasitas sumber daya, capaian kinerja, hingga kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan. Analisis dilakukan tidak hanya dalam bentuk deskriptif, melainkan juga diagnostik, sehingga dapat diketahui kekuatan, kelemahan, serta tantangan yang dihadapi perangkat daerah dalam lima tahun terakhir. Dengan demikian, bagian ini diharapkan mampu memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan arah kebijakan dan strategi perbaikan pelayanan ke depan.

2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah

Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berlandaskan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022. Regulasi ini menegaskan peran dalam mendukung pelaksanaan tugas Bupati melalui unit-unit kerja yang terorganisasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, struktur Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - 1) Bagian Pemerintahan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas kelompok jabatan fungsional; dan
 - 3) Bagian Hukum terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:
 - 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional; dan
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
 - 1) Bagian Umum, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
 - 2) Bagian Organisasi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
 - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas : Sub Bagian Protokol; dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada skema Gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Sekretariat Daerah

Pasal 4-Tugas: Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas dan Badan Daerah.

Pasal 5-Fungsi:

- 1) Koordinasi penyusunan kebijakan daerah.
- 2) Koordinasi pelaksanaan tugas SKPD.
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.
- 4) Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi daerah.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati.

B. Asisten Sekretariat Daerah

1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 6-Tugas: Membantu Sekda dalam penyusunan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum, kerja sama, serta kesejahteraan rakyat, termasuk koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan.

Pasal 7-Fungsi:

- a) Koordinasi penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.
- b) Koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, hukum, kesra, dan kerja sama.
- c) Pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang pemerintahan, hukum, kerja sama.
- d) Pemantauan dan evaluasi kebijakan kesra (tujuan, dampak, faktor penghambat).
- e) Melaksanakan fungsi lain dari Sekda.

2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 8-Tugas: Membantu Sekda dalam koordinasi kebijakan, pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di bidang perekonomian, pembangunan, pengadaan barang/jasa, dan SDA.

Pasal 9-Fungsi:

- a) Koordinasi kebijakan di bidang perekonomian, pembangunan, SDA.
- b) Koordinasi pelaksanaan perangkat daerah di bidang ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa, SDA.
- c) Penyusunan kebijakan pengadaan barang/jasa.
- d) Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengadaan barang/jasa.

- e) Pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi, pembangunan, SDA.
- f) Melaksanakan fungsi lain dari Sekda

3) Asisten Administrasi Umum

Pasal 10-Tugas: Membantu Sekda dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, perencanaan, dan keuangan.

Pasal 11-Fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan di bidang organisasi.
- b) Pelaksanaan kebijakan umum, protokol dan komunikasi pimpinan, perencanaan, keuangan.
- c) Koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang organisasi.
- d) Pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol, komunikasi pimpinan, perencanaan, keuangan.
- e) Pemantauan dan evaluasi kebijakan organisasi.
- f) Pembinaan administrasi dan ASN.
- g) Melaksanakan fungsi lain dari Sekda.

C. Bagian-Bagian Sekretariat Daerah

1) Bagian Pemerintahan

Pasal 12-Tugas: Melaksanakan penyiapan dan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan administrasi di bidang pemerintahan, kewilayahan, kerja sama, dan otonomi daerah.

Pasal 13-Fungsi: Menyiapkan bahan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, serta pembinaan administrasi pemerintahan.

2) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 14-Tugas: Menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan perangkat daerah, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan masyarakat.

Pasal 15-Fungsi: Menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan kesra, termasuk pencapaian tujuan, dampak, dan faktor penghambat.

3) Bagian Hukum

Pasal 16-Tugas: Menyiapkan dan mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di bidang hukum, perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi.

Pasal 17-Fungsi: Menyiapkan bahan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi bidang hukum.

4) Bagian Perekonomian dan SDA

Pasal 18-Tugas: Melaksanakan koordinasi kebijakan, koordinasi pelaksanaan perangkat daerah, serta evaluasi di bidang pembinaan BUMD/BLUD, perekonomian, dan SDA.

Pasal 19-Fungsi: Menyiapkan kebijakan, koordinasi, evaluasi (pencapaian tujuan, dampak, faktor penghambat).

5) Bagian Administrasi Pembangunan

Pasal 20-Tugas: Melaksanakan penyiapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 21-Fungsi: Menyiapkan bahan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.

6) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 22-Tugas: Menyiapkan dan mengoordinasikan kebijakan, koordinasi pelaksanaan perangkat daerah, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa, e-procurement, pembinaan dan advokasi.

Pasal 23-Fungsi: Menyiapkan bahan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa.

7) Bagian Umum

Pasal 24-Tugas: Menyiapkan pelaksanaan kebijakan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 25-Fungsi: Menyiapkan bahan kebijakan, pemantauan dan evaluasi bidang umum.

8) Bagian Organisasi

Pasal 26-Tugas: Menyiapkan dan mengoordinasikan kebijakan, pelaksanaan perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi.

Pasal 27-Fungsi: Menyiapkan bahan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang organisasi.

9) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Pasal 28-Tugas: Melaksanakan penyiapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Pasal 29-Fungsi: Menyiapkan bahan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi protokol dan komunikasi pimpinan.

Pasal 30-Sub Bagian Protokol-Tugas:

- a) Melaksanakan tata protokoler penyambutan tamu.
- b) Menyiapkan koordinasi/fasilitasi keprotokolan.
- c) Menyusun informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala/Wakil Kepala Daerah.
- d) Menginformasikan jadwal kegiatan Pemda.
- e) Fasilitasi kegiatan Kepala/Wakil Kepala Daerah.
- f) Melaksanakan tugas lain sesuai kewenangan.

10) Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 31-Tugas: Menyiapkan dan mengoordinasikan kebijakan, koordinasi pelaksanaan perangkat daerah, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

Pasal 32-Fungsi: Menyiapkan bahan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur didukung oleh 97 orang pegawai. Dari jumlah tersebut, sebanyak tujuh orang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi Umum. Pada jenjang Jabatan Administrator (Eselon III) terdapat delapan orang pejabat, Jabatan Fungsional sebanyak 36 orang dan Jabatan Pelaksana sebanyak 46 orang.

Rincian lebih lanjut mengenai jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana	Jumlah
1	Sekretaris Daerah	1	-	-	-	1
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1	-	-	-	1
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1	-	-	-	1
4	Asisten Administrasi Umum	1	-	-	-	1
5	Staf Ahli	1	-	-	-	1

6	Staf Ahli	1	-	-	-	1
7	Staf Ahli	1	-	-	-	1
8	Kepala Bagian Pemerintahan	-	1	3	5	9
9	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	4	2	6
10	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	1	-	6	7
11	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	-	1	4	1	6
12	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya alam	-	1	3	1	5
13	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	1	13	4	18
14	Kepala Bagian Organisasi	-	1	4	3	8
15	Kepala Bagian Hukum	-	-	3	1	4
16	Kepala Bagian Umum	-	1	1	16	18
17	Kepala Bagian Perencana dan Keuangan	-	1	1	7	9
Jumlah		7	8	36	46	97

Sumber: Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2025

Kondisi kepegawaian berdasarkan pendidikan yang ditamatkan menunjukkan adanya variasi tingkat pendidikan di antara pegawai. Penyajian data ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai sebaran pegawai menurut jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

No	URAIAN	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	Sekretaris Daerah			1				
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			1				
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan			1				
4	Asisten Administrasi Umum		1					
3	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan		1					
6	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan			1				
7	Staf Ahli Bidang Kesejahteraan dan Sumber Daya Alam		1					
5	Bagian Pemerintahan		3	4		2		
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat			4		1		
7	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			6		1		
8	Bagian Administrasi Pembangunan		1	5				
10	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		1	3	1			
11	Bagian Organisasi		2	5		1		
12	Bagian Hukum dan Perundang-Undangan		1	4				
13	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		1	17				
14	Bagian Umum			7	2	6	2	
15	Bagian Perencanaan dan Keuangan		2	5		2	1	
JUMLAH		0	14	64	3	13	3	0

Sumber: Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2025

Keberhasilan pelaksanaan tugas pegawai didukung oleh sarana prasarana yang memadai, meliputi fasilitas kantor, peralatan kerja, teknologi informasi, dan kendaraan dinas yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Rincian sarana prasarana yang tersedia di lingkungan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI BARANG		JUMLAH
			BAIK	RUSAK	
1	Tanah Kantor Bupati	m ²	861.148	-	861.148
2	Kendaraan Roda 4	unit	1		1
3	Kendaraan Roda 2	unit	39	2	41
4	AC	unit	41	4	45
5	Brangkas	unit	55	15	70
6	Dispenser	unit	13	1	14
7	Mesin Fax	unit	30	10	40
8	Filling Kabinet	unit	2	3	5
9	Genset	unit	39	17	56
10	Handy Cam	unit	6	-	6
11	Handy Talky	unit	9	11	20
12	Hardisk Eksternal	unit	17	-	17
13	Kamera Digital	unit	20	22	42
14	Komputer / PC	unit	5	3	8
15	Kulkas/ Lemari Es	unit	17	24	41
16	Kursi Kerja	unit	5	-	5
17	Kursi Rapat	unit	100	14	114
18	Kursi Tunggu	unit	115	45	160
19	Kursi Tamu	unit	16	-	16
20	Laptop	unit	20	9	29
21	Lemari Arsip	unit	60	10	71
22	Lemari Besi	unit	30	10	40
23	Lemari Kaca	unit	15	5	20
24	Meja Kerja	unit	9	-	9
25	Meja Rapat	unit	62	20	82
26	Mesin Absensi	unit	37	30	67
27	Mesin Penghancur Kertas	unit	2	1	3
28	Mesin Tik	unit	11	6	17
29	Mesin Potong Rumput	unit	-	8	8
30	Podium	set	3	2	5
31	Printer	unit	4	1	5
32	Proyektor	unit	52	8	60
33	Televisi	unit	12	13	25
34	Scanner	unit	27	5	32

35	Sound System	Set	4	6	10
36	CCTV	Set	14	5	19
37	Meja Resepsionis	Set	3	2	5
38	Jam Dinding	Set	2	2	4

Sumber: Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode jangka menengah tahun 2021–2026 dievaluasi berdasarkan sasaran dan target yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021–2026. Tingkat capaian tersebut diukur melalui indikator kinerja pelayanan perangkat daerah maupun indikator lainnya yang relevan. Hasil evaluasi ini disajikan dalam bentuk Reviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2021–2026.

Reviu pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode 2021–2026 menjadi dasar penting dalam merumuskan isu-isu strategis untuk periode perencanaan berikutnya. Adapun hasil reviu atas pencapaian kinerja pelayanan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Reviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

No.	Indikator Kinerja	KKA	Target					Realisasi					Capaian (%)				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	N/A	82	86	90	N/A	N/A	82	88	97	N/A	N/A	100%	102%	108%	N/A
2	Predikat AKIP OPD	CC	N/A	B (60-70)	BB (70-80)	BB (70-80)	N/A	N/A	B (65,03)	BB (7,16)	BB (72,16)	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A
3	Laporan Keuangan Sesuai SAP	NA	N/A	Sesuai (100%)	Sesuai (100%)	Sesuai (100%)	N/A	N/A	Sesuai (100%)	Sesuai (100%)	Sesuai (100%)	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A
4	Persentase Koordinasi Pelaksanaan Program di Bidang Pemerintahan	100%	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	99%	99%	99%	N/A	N/A	99%	99%	99%	N/A
5	Persentase Koordinasi Pelaksanaan Program di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	98%	98%	98%	N/A	N/A	98%	98%	98%	N/A
6	Persentase Koordinasi Pelaksanaan Program di Bidang Administrasi Umum	100%	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	98%	98%	98%	N/A	N/A	98%	98%	98%	N/A

Reviu pencapaian kinerja pelayanan menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program pegawai sangat bergantung pada dukungan anggaran, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Realisasi dan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2021–2025

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio	Pertumbuhan	
				Anggaran	Realisasi
2021	33.341.965.191	31.038.323.682	93%	0%	0%
2022	40.032.309.666	38.280.138.127	96%	20%	23%
2023	38.766.466.847	37.155.617.415	96%	-3%	-3%
2024	43.574.741.594	41.939.766.218	96%	12%	13%
2025	35.207.818.993	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Realisasi Fisik dan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2025

Berdasarkan data realisasi dan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2021–2024, terlihat bahwa efektivitas pelaksanaan program pelayanan sangat bergantung pada dukungan anggaran yang tersedia. Rasio realisasi terhadap anggaran relatif stabil pada kisaran 93% hingga 96%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan cukup efisien, dan penggunaan anggaran mampu diserap dengan baik sesuai alokasi yang ditetapkan.

Namun, apabila dianalisis secara lebih dalam dari sisi pertumbuhan anggaran dan realisasi, terlihat pola ketergantungan yang cukup kuat antara peningkatan dukungan anggaran dan capaian kinerja. Tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan signifikan, di mana peningkatan anggaran sebesar 20% diikuti dengan peningkatan realisasi sebesar 23%. Hal ini menggambarkan bahwa tambahan alokasi anggaran mampu direspons secara produktif oleh perangkat daerah melalui peningkatan volume dan kualitas program pelayanan.

Sebaliknya, pada tahun 2023 terjadi penurunan baik pada sisi anggaran (-3%) maupun realisasi (-3%). Meskipun rasio realisasi tetap tinggi, kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan ruang fiskal mulai mempengaruhi kapasitas pelaksanaan program. Penurunan tersebut kemungkinan merupakan dampak dari penyesuaian fiskal nasional yang menuntut efisiensi pada seluruh jenjang pemerintahan. Tahun 2024 memperlihatkan pemulihan positif, dengan peningkatan anggaran sebesar 12% yang diikuti kenaikan realisasi sebesar 13%. Hal ini menegaskan bahwa ketika dukungan anggaran meningkat, kinerja pelaksanaan program juga terdorong naik. Secara diagnostik, hubungan ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih sensitif terhadap perubahan alokasi anggaran.

Dalam konteks manajerial, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun efisiensi pelaksanaan tergolong baik, ketergantungan terhadap besaran anggaran masih tinggi. Oleh karena itu, strategi penguatan kinerja ke depan perlu difokuskan pada dua hal utama yaitu pertama perencanaan anggaran berbasis prioritas dan dampak, sehingga program yang memiliki kontribusi langsung terhadap pelayanan publik tetap dapat berjalan optimal meskipun terjadi keterbatasan dana dan kedua peningkatan efisiensi dan produktivitas internal, melalui optimalisasi sumber daya manusia, digitalisasi proses kerja, serta pengendalian terhadap belanja non-esensial. Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi perlu diperkuat agar pelaksanaan program tetap adaptif terhadap perubahan kebijakan fiskal dan kebutuhan masyarakat, sehingga efektivitas pelayanan dan ketahanan program terhadap fluktuasi anggaran dapat terjaga.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditentukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian yang ada di dalam struktur organisasi. Setiap bagian memiliki peran dan jenis layanan yang berbeda, sehingga sasaran penerima manfaatnya juga beragam. Secara umum, layanan yang diberikan Sekretariat Daerah lebih difokuskan pada perangkat daerah, pimpinan daerah, serta pemangku kepentingan internal pemerintahan. Untuk bagian tertentu, jenis layanan dan sasaran penerimanya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dalam struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pengelompokan jenis layanan beserta kelompok sasarannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Kelompok Sasaran Layanan

No.	Bagian	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Bagian Pemerintahan	Koordinasi administrasi pemerintahan, kewilayahan, dan fasilitasi kebijakan	Perangkat Daerah lain, Camat, Pimpinan Daerah
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi urusan keagamaan, sosial, kesejahteraan masyarakat	Lembaga kemasyarakatan, keagamaan, masyarakat umum
3	Bagian Hukum	Fasilitasi perumusan peraturan daerah, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi	DPRD, Perangkat Daerah, Bupati
4	Bagian Perekonomian dan SDA	Koordinasi pembangunan ekonomi, pengelolaan SDA, BUMD/BLUD	Perangkat Daerah terkait, pelaku usaha, BUMD/BLUD
5	Bagian Administrasi Pembangunan	Perumusan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan pembangunan	Perangkat Daerah, Bappeda, Pimpinan Daerah
6	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan pengadaan barang/jasa, layanan e-procurement, advokasi dan pembinaan	SKPD pengguna barang/jasa, penyedia, UKPBJ

7	Bagian Umum	Dukungan administrasi umum, ASN, perlengkapan dan rumah tangga	ASN Sekretariat, Pimpinan Daerah
8	Bagian Organisasi	Pembinaan kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, reformasi birokrasi	Perangkat Daerah, SDM internal Setda
9	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Layanan protokol, dokumentasi, komunikasi pimpinan	Bupati, Wakil Bupati, tamu resmi, media, internal Setda
10	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penyusunan rencana, anggaran, keuangan dan pelaporan	Perangkat Daerah, Bupati/Wakil Bupati

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Perumusan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah didasarkan pada kajian dokumen perencanaan 2021–2025, telaahan strategi lingkungan hidup, serta aspirasi yang dihimpun melalui Sekretariat Daerah. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi kendala utama penyelenggaraan pemerintahan dan menetapkan langkah-langkah strategi yang perlu diprioritaskan. Permasalahan yang dipilih sebagai cerminan kesenjangan antara target pembangunan dan pencapaian aktual, disajikan secara ringkas, serta terfokus pada aspek yang paling berpengaruh terhadap kualitas pelayanan.

Strategi Isu ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan global, nasional, dan regional. Penetapannya mengacu pada dokumen perencanaan, laporan resmi lembaga pemerintah maupun independen, serta masukan masyarakat yang relevan dengan kewenangan Sekretariat Daerah. Dengan demikian, isu strategi mencerminkan kondisi internal sekaligus peluang dan tantangan eksternal yang mempengaruhi arah pembangunan daerah.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029 serta tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkaitan erat dengan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas koordinasi antar perangkat daerah, dan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung pelayanan publik yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Secara umum, inti masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme penegakan regulasi antar-OPD belum optimal.
2. Koordinasi operasional sering bersifat *ad-hoc*.
3. Sistem arsip dan tata naskah belum terintegrasi digital.
4. Pemantauan pelayanan publik belum optimal.
5. Data masyarakat dan wilayah belum terbaru.
6. Akses layanan hukum dan administrasi publik terbatas.
7. Pengelolaan pelaporan publik belum optimal.
8. Perencanaan berbasis data belum optimal.
9. Sinkronisasi program daerah belum optimal.
10. Kapasitas pengadaan terbatas.
11. Pengelolaan SDA belum optimal.
12. Konflik lahan belum bersertifikat.
13. Lemahnya mekanisme mediasi & batas pertanahan belum jelas.
14. Penguatan sistem informasi pertanahan belum terintegrasi.

2.2.2 Isu Strategis

Perumusan isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur didasarkan pada hasil identifikasi permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Proses analisis juga memperhatikan dinamika lingkungan global, nasional, maupun regional yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta potensi daerah yang menjadi kewenangan Sekretariat Daerah. Melalui pendekatan ini, isu strategis tidak hanya mencerminkan tantangan internal, tetapi juga menampung peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Teknik penyimpulan isu strategis Sekretariat Daerah ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

No.	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis Sekretariat Daerah
				Global	Nasional	Regional	
1	Fungsi administratif dan koordinatif Sekretariat Daerah (tata naskah, manajemen arsip, dukungan kebijakan) yang menjadi kewenangan PD	1) Mekanisme penunangan antar-OPD belum terstandar 2) Koordinasi operasional sering bersifat ad-hoc 3) Sistem arsip dan tata naskah belum terintegrasi digital 4) Monitoring pelaksanaan penunangan urusan sistematis	Keterbatasan kapasitas SDM aparatur dan kelembagaan (Isu SDM dan Kelembagaan, hlm. IV-20)	Standar profesionalisme dan efisiensi birokrasi global	Reformasi birokrasi nasional dan penerapan sistem merit ASN	Sinkronisasi kelembagaan antar-perangkat daerah dan wilayah	Belum optimalnya mekanisme penunangan urusan dan efektivitas administrasi internal Sekretariat Daerah yang mendukung pelaksanaan OPD secara konsisten dan terdigitalisasi.

2	Tersedianya unit layanan pemerintahan dan kewilayahan; kapasitas fasilitasi kebijakan sosial; potensi integrasi layanan berbasis TI	1) Layanan publik belum optimal 2) Data masyarakat dan wilayah belum terbaru 3) Akses layanan hukum dan administrasi publik terbatas 4) Pengelolaan pelaporan publik belum optimal	Pemanfaatan TI dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan (Isu Ekonomi dan Teknologi, hlm. IV-24) Konflik lahan dan tata ruang (Isu Lingkungan, hlm. IV-23)	Tuntutan transparansi publik dan transformasi digital pemerintahan	Implementasi SPBE dan kebijakan pelayanan publik nasional	Integrasi layanan lintas wilayah dan pemerintahan daerah	Masih terdapat keterbatasan integrasi layanan pemerintahan dan rendahnya digitalisasi administrasi yang menghambat efektivitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
3	Potensi SDA lokal, infrastruktur daerah, serta kapasitas perencanaan pembangunan daerah	1) Perencanaan berbasis data belum optimal 2) Sinkronisasi program daerah rendah 3) Kapasitas pengadaan terbatas 4) Pengelolaan SDA belum optimal	Keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan pembangunan dan sumber daya daerah (Isu SDM dan Kelembagaan, hlm. IV-20)	Perubahan ekonomi global dan tuntutan pembangunan hijau	Kebijakan pembangunan berkelanjutan nasional dan tata kelola SDA	Kolaborasi pembangunan antar daerah dan pengelolaan SDA wilayah	Belum optimalnya koordinasi perencanaan dan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan serta akuntabilitas pengelolaan SD daerah.

4	Adanya basis komunitas, bukti administrasi lokal; kewenangan mediasi di Bagian Pemerintahan	1) Konflik lahan belum bersertifikat 2) Lemahnya mekanisme mediasi dan batas pertanahan belum jelas 3) Penguatan sistem informasi pertanahan belum terintegrasi	Konflik lahan dan tata ruang (Isu Lingkungan, hlm. IV-23)	Prinsip keadilan agraria dan keberlanjutan lingkungan global (SDGs 15–16)	Kebijakan reformasi agraria dan sertifikasi tanah nasional	Konflik batas wilayah dan sengketa lahan antar masyarakat daerah	Masih rendahnya efektivitas penyelesaian sengketa tanah garapan akibat lemahnya integrasi data pertanahan, belum standarnya mekanisme mediasi, dan terbatasnya akses masyarakat pada mekanisme legal-administratif.
---	---	---	---	---	--	--	---

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

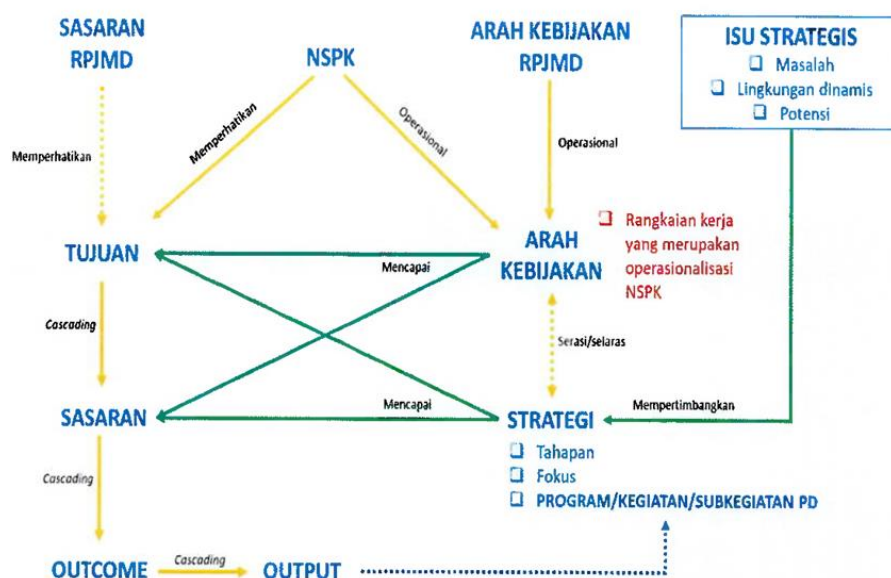
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode 2025–2029 diarahkan untuk mendukung terwujudnya misi ketiga Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu:

“Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing, Tata Kelola Pemerintahan Yang Kredibel Dan Kondusif”

Berdasarkan penjabaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029, tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur difokuskan pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, bersih, dan akuntabel. Oleh karena itu, tujuan yang menjadi mandat utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah:

“Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Profesional, Dan Akuntabel”



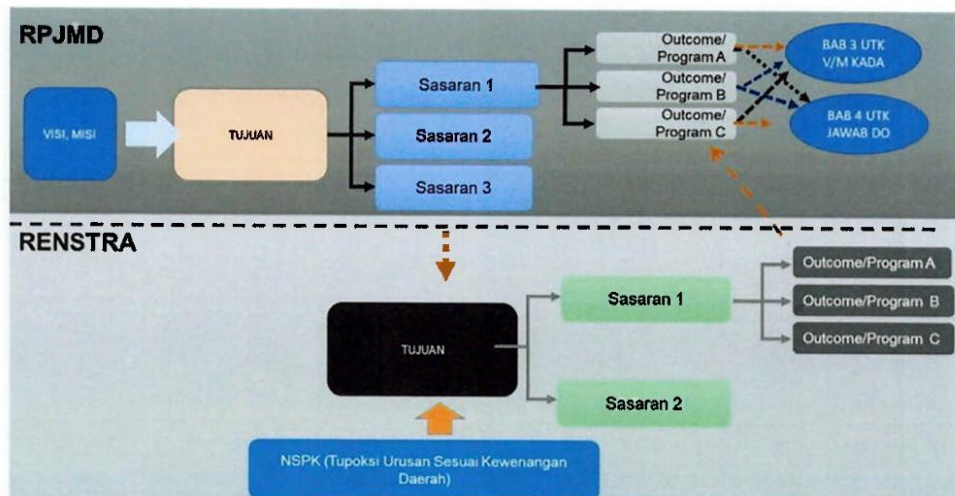
Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

Sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dirancang untuk mendukung secara langsung tercapainya tujuan peningkatan birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan akuntabel. Fokus utama sasaran strategis ini adalah pencapaian *outcome*.

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Meningkatnya Akuntabilitas Daerah. Capaian tersebut diukur melalui indikator kinerja, antara lain:

1. Nilai LPPD;
2. Rata-rata Nilai SAKIP OPD;
3. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD);
4. Nilai SAKIP OPD, dan
5. Indeks Reformasi Birokrasi.



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

Strategi yang ditempuh Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirancang antara lain melalui:

- 1 Optimalisasi peran koordinatif dan fasilitatif dalam penanganan permasalahan strategis lintas sektor, termasuk penyelesaian isu-isu kewilayahan dan sengketa tanah garapan secara kolaboratif.
- 2 Penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan evaluasi pembangunan daerah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang konsisten, terukur, dan berorientasi hasil.
- 3 Peningkatan kualitas perumusan regulasi dan implementasi kebijakan hukum daerah yang adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat.
- 4 Penerapan prinsip *good governance* dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan, dengan menekankan transparansi, efektivitas, efisiensi, partisipasi publik, dan akuntabilitas kinerja.
- 5 Penguatan kapasitas aparatur dan transformasi digital pemerintahan, guna mendukung efisiensi pelayanan administrasi, pengambilan keputusan berbasis data, serta integrasi sistem informasi lintas perangkat daerah.

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan akuntabel	Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Profesional, Dan Akuntabel		Nilai SAKIP (Angka)	62,38	65	67	70	72	75	80,5
			Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	86,46	87,05	87,64	88,23	88,82	89,41	90
		Meningkatnya Akuntabilitas Daerah	Nilai LPPD (Angka)	-	3,0	3,115	3,2	3,215	3,225	3,3
			Rata Rata Nilai SAKIP OPD (Angka)	62,38	65	67	70	72	75	80,5
			Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) (Angka)	-	3,44	3,47	3,51	3,54	3,58	3,60
			NILAI SAKIP OPD (Angka)	72,16	73	74	76	77	79	80
			Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	86,46	87,05	87,64	88,23	88,82	89,41	90

3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

Arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah diawali dengan dilakukan penahapan prioritas tahunan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Konsolidasi awal akuntabilitas: pembenahan administrasi, perbaikan dasar tata naskah dan arsip, awal pembinaan OPD	Standarisasi: SOP penunjang OPD, perbaikan sistem pelaporan, mulai penguatan SAKIP OPD dan LPPD	Integrasi dan Digitalisasi: integrasi data antar-OPD, digitalisasi dokumen dan koordinasi, peningkatan mutu SAKIP dan LPPD	Pemantapan: harmonisasi kebijakan, optimalisasi SPBE, perbaikan berkelanjutan akuntabilitas daerah	Pencapaian Optimal: akuntabilitas daerah pada tingkat tinggi, proses administrasi matang dan terdigitalisasi penuh

Sumber: Data diolah penulis 2025

Sebagai bentuk operasionalisasi sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta arah kebijakan misi ketiga dan tujuan kedua RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah, arah kebijakan Renstra Sekretariat Daerah dapat dirumuskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

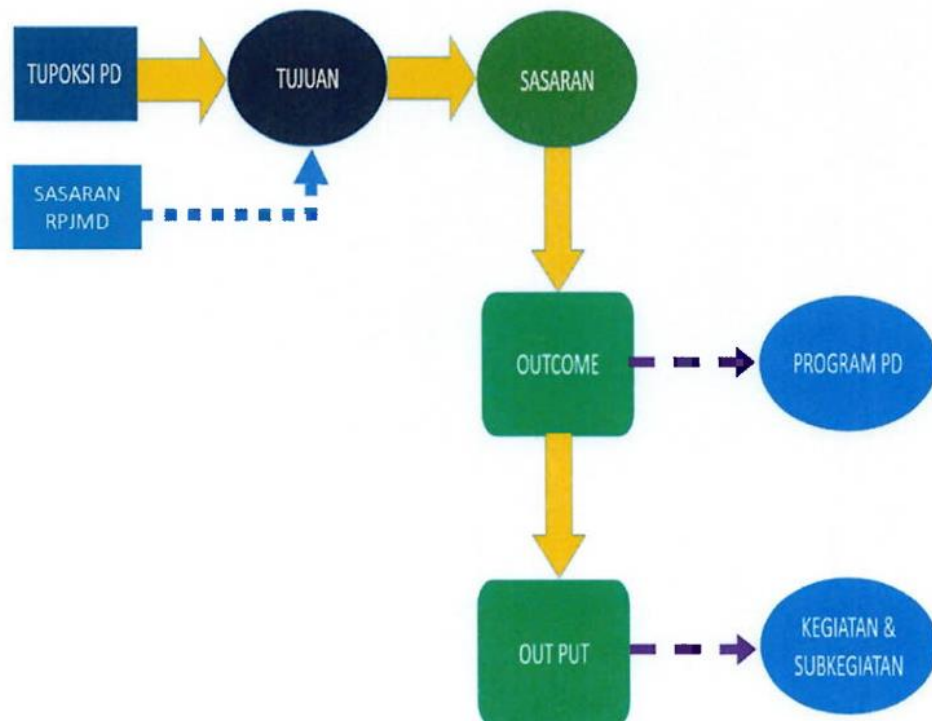
Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
Urusan Sekretariat Daerah	Meningkatnya birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan akuntabel	Peningkatan efektivitas mekanisme penunjang urusan melalui standarisasi proses administrasi, penguatan tata kelola internal Setda, serta percepatan digitalisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas OPD secara konsisten dan efisien.
		Penguatan integrasi layanan pemerintahan dan digitalisasi administrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
		Peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan, penguatan kapasitas kelembagaan Setda, dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah.
Urusan Pertanahan	Meningkatnya birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan akuntabel	Penguatan efektivitas penyelesaian sengketa tanah melalui integrasi data pertanahan, standarisasi mekanisme mediasi, serta perluasan akses masyarakat terhadap layanan legal-administratif pertanahan.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Uraian program menampilkan keseluruhan program utama yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Setiap program dirumuskan untuk mendukung sasaran strategis RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Renstra PD, selaras dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) serta berfokus pada peningkatan efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Program-program tersebut mencerminkan peran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai koordinator dan fasilitator dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Secara konseptual, alur perencanaan dan pelaksanaan program dapat dijelaskan melalui tahapan berikut:



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Keterangan:

1. Tupoksi Perangkat Daerah (Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah):

Ini adalah fondasi paling atas. Tupoksi mendefinisikan tugas, pokok, dan fungsi utama yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua perencanaan harus berangkat dari dan selaras dengan tupoksi ini.

2. Tujuan:

Berdasarkan tupoksi, Perangkat Daerah kemudian menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan merupakan pernyataan yang bersifat umum dan strategis tentang arah pembangunan daerah.

3. Sasaran:

Dari tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan menjadi sasaran. Sasaran lebih spesifik dan terukur dibandingkan tujuan, seringkali memiliki target waktu dan indikator yang jelas. Kata "sasaran" muncul dua kali (yang pertama merujuk pada sasaran strategis RPJMD, dan yang kedua merujuk pada sasaran strategis OPD) menekankan bahwa sasaran-sasaran ini merupakan turunan langsung dari RPJM.

4. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah):

Ini adalah dokumen perencanaan resmi pemerintah daerah untuk periode 5 tahun. RPJMD berisi tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah. Diagram menunjukkan bahwa sasaran yang telah ditetapkan harus sesuai dan merupakan bagian dari rpjmd.

5. *Outcome* (Hasil):

Outcome adalah perubahan, manfaat, atau dampak yang diharapkan terjadi di masyarakat sebagai hasil dari program yang dilaksanakan. *Outcome* berada di tingkat yang lebih tinggi daripada output.

6. Program Perangkat Daerah:

Untuk mencapai sasaran dan outcome yang diinginkan, Perangkat Daerah merancang berbagai program. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan.

7. *Output* (Keluaran):

Output adalah produk atau layanan langsung yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan dan sub-kegiatan. *Output* bersifat lebih langsung dan terukur.

8. Kegiatan dan Sub-kegiatan:

Ini adalah tingkat operasional paling dasar. Kegiatan adalah tindakan konkret yang dilakukan untuk menghasilkan *output* yang telah direncanakan dalam sebuah program. Sub-kegiatan adalah penjabaran lebih detail dari sebuah kegiatan.

Berdasarkan kerangka tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan beberapa program utama, yaitu:

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini difokuskan pada upaya fasilitasi dan koordinasi dalam penanganan serta penyelesaian konflik atau sengketa tanah garapan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Peran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, memfasilitasi proses mediasi, dan mendukung langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan oleh instansi teknis maupun pemangku kepentingan terkait. Tujuannya adalah untuk membantu terciptanya solusi yang adil serta mengurangi potensi konflik sosial.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Bertujuan memberikan dukungan teknis dan administratif yang efektif serta efisien kepada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Program ini mencakup koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan penyediaan sarana penunjang agar urusan pemerintahan daerah berjalan lancar.

3. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Berorientasi pada penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Program ini menekankan pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlindungan sosial, serta inisiatif yang langsung berdampak pada peningkatan taraf hidup rakyat.

4. Program Perekonomian dan Pembangunan

Dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan mempercepat pembangunan. Fokus utamanya adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendukung UMKM, serta memastikan proyek pembangunan infrastruktur berjalan sesuai target untuk menunjang aktivitas perekonomian daerah.

Dengan pelaksanaan keempat program tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkontribusi langsung terhadap pencapaian output. Seluruh pencapaian ini pada akhirnya bermuara pada keberhasilan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
- Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, Profesional, dan Akuntabel	Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Profesional, Dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Daerah			Nilai SAKIP (Angka)	
					Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	
					Nilai LPPD (Angka)	
					Rata Rata Nilai SAKIP OPD (Angka)	
					Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) (Angka)	
					NILAI SAKIP OPD (Angka)	
					Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	
		Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan			Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
					Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Tercapainya Pelaksanaan Program Penunjang			Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

			Urusan Pemerintahan Daerah di setiap perangkat daerah			
			Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah

					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	4.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	4.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	4.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
				Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi

					Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
				Persentase terlaksananya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
				Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi

					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4.01.01.2.13.0002 - Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	4.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
				Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.2.14.0001 - Fasilitas Keprotokolan
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14.0002 - Fasilitas Komunikasi Pimpinan

		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan, Politik, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	4.01.02.2.01.0004 - Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	4.01.02.2.01.0005 - Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
				Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4.01.02.2.02.0001 - Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	4.01.02.2.02.0004 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	4.01.02.2.02.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
				Indeks Reformasi Hukum, Indeks Kualitas Kebijakan.	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum (Kasus)	4.01.02.2.03 - Fasilitas dan Koordinasi Hukum
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	4.01.02.2.03 - Fasilitas dan Koordinasi Hukum
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	4.01.02.2.03 - Fasilitas dan Koordinasi Hukum

					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	4.01.02.2.03.0001 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah
					Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum (Kasus)	4.01.02.2.03.0002 - Fasilitas Bantuan Hukum
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
				Terlaksananya Kerjasama antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04 - Fasilitas Kerja Sama Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04 - Fasilitas Kerja Sama Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	4.01.02.2.04 - Fasilitas Kerja Sama Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04.0001 - Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04.0002 - Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan				Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian, Pembangunan, Sumber Daya Alam, dan Pengadaan Barang Jasa (Persentase)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)	4.01.03.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)	4.01.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
				Indeks Pengelolaan Program Pembangunan secara Kuantitatif maupun Kualitatif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
				Indeks Tata Kelola Pengadaan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
					Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	4.01.03.2.04.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	4.01.03.2.04.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

4.2 Uraian Kegiatan

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki kegiatan yang dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan-kegiatan tersebut mencerminkan peran Sekretariat Daerah sebagai koordinator, fasilitator, dan pendukung administratif bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui kegiatan ini, Sekretariat Daerah berupaya memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif, birokrasi bekerja profesional dan akuntabel, serta pelayanan kepada perangkat daerah, pimpinan daerah, dan masyarakat dapat terlaksana secara optimal.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam periode Renstra Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Uraian Kegiatan

No.	Kegiatan
1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
11	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
12	Penataan Organisasi
13	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
14	Administrasi Tata Pemerintahan

15	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
16	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
17	Fasilitasi Kerja Sama Daerah
18	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
19	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
20	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
21	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif

Subkegiatan merupakan bagian terkecil dari kegiatan yang dapat diukur dan dievaluasi secara spesifik. Setiap subkegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, serta pagu anggaran indikatif yang mencerminkan besaran alokasi yang direncanakan. Pendekatan ini memastikan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Subkegiatan juga berfungsi sebagai instrumen kontrol kinerja yang konkret, sehingga pelaksanaan Renstra dapat dipantau secara berkesinambungan dan terarah pada pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Adapun uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
		2026		2027		2028		2029		2030	
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			7.295.461,63		7.415.313,46		7.449.727,10		7.484.829,02		7.520.632,97
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			7.295.461,63		7.415.313,46		7.449.727,10		7.484.829,02		7.520.632,97
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	100	7.295.461,63	100	7.415.313,46	100	7.449.727,10	100	7.484.829,02	100	7.520.632,97
2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			7.295.461,63		7.415.313,46		7.449.727,10		7.484.829,02		7.520.632,97
Terfasilitasinya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	3	7.295.461,63	3	7.415.313,46	3	7.449.727,10	3	7.484.829,02	3	7.520.632,97
2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			7.295.461,63		7.415.313,46		7.449.727,10		7.484.829,02		7.520.632,97
Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	3	7.295.461,63	3	7.415.313,46	3	7.449.727,10	3	7.484.829,02	3	7.520.632,97
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH			31.782.490.092,8 1		32.304.621.498,9 8		32.454.543.641,4 1		32.607.464.228,9 6		32.763.443.227,0 7
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			24.931.702.610,0 0		25.341.287.413,0 0		25.458.893.499,0 0		25.578.851.709,0 0		25.701.209.082,0 0
Tercapainya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di setiap perangkat daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100.00	24.931.702.610,0 0	100.00	25.341.287.413,0 0	100.00	25.458.893.499,0 0	100.00	25.578.851.709,0 0	100.00	25.701.209.082,0 0
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			188.365.117,00		191.459.630,00		192.348.173,00		193.254.486,00		194.178.926,00
Terlaksananya Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	188.365.117,00	1	191.459.630,00	1	192.348.173,00	1	193.254.486,00	1	194.178.926,00

	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		4		4		4		4	
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2		2		2		2		2	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		2		2		2	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		1		1		1	
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	3		3		3		3		3	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		1		1		1	
4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			112.430.926,00		114.277.972,00		114.808.322,00		115.349.283,00		115.901.059,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	112.430.926,00	2	114.277.972,00	2	114.808.322,00	2	115.349.283,00	2	115.901.059,00
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			5.810.759,00		5.906.220,00		5.933.630,00		5.961.588,00		5.990.106,00

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	5.810.759,00	1	5.906.220,00	1	5.933.630,00	1	5.961.588,00	1	5.990.106,00
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			9.297.215,00		9.449.952,00		9.493.808,00		9.538.541,00		9.584.169,00
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	9.297.215,00	1	9.449.952,00	1	9.493.808,00	1	9.538.541,00	1	9.584.169,00
4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			8.716.139,00		8.859.330,00		8.900.445,00		8.942.382,00		8.985.159,00
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	8.716.139,00	1	8.859.330,00	1	8.900.445,00	1	8.942.382,00	1	8.985.159,00
4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			10.023.560,00		10.188.229,00		10.235.512,00		10.283.740,00		10.332.932,00
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	10.023.560,00	1	10.188.229,00	1	10.235.512,00	1	10.283.740,00	1	10.332.932,00
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			17.795.450,00		18.087.798,00		18.171.742,00		18.257.364,00		18.344.699,00
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	17.795.450,00	4	18.087.798,00	4	18.171.742,00	4	18.257.364,00	4	18.344.699,00
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.740.676,00		3.802.129,00		3.819.774,00		3.837.772,00		3.856.131,00
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	3.740.676,00	1	3.802.129,00	1	3.819.774,00	1	3.837.772,00	1	3.856.131,00
4.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			4.444.977,00		4.518.000,00		4.538.968,00		4.560.354,00		4.582.169,00
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	4.444.977,00	1	4.518.000,00	1	4.538.968,00	1	4.560.354,00	1	4.582.169,00
4.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			6.030.922,00		6.130.000,00		6.158.449,00		6.187.466,00		6.217.064,00

Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	6.030.922,00	1	6.130.000,00	1	6.158.449,00	1	6.187.466,00	1	6.217.064,00
4.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.737.176,00		4.815.000,00		4.837.346,00		4.860.139,00		4.883.387,00
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2	4.737.176,00	2	4.815.000,00	2	4.837.346,00	2	4.860.139,00	2	4.883.387,00
4.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			5.337.317,00		5.425.000,00		5.450.177,00		5.475.857,00		5.502.051,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	3	5.337.317,00	3	5.425.000,00	3	5.450.177,00	3	5.475.857,00	3	5.502.051,00
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.023.742.631,0 0		11.204.843.679,0 0		11.256.844.108,0 0		11.309.884.545,0 0		11.363.985.792,0 0
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4	11.023.742.631,0 0	4	11.204.843.679,0 0	4	11.256.844.108,0 0	4	11.309.884.545,0 0	4	11.363.985.792,0 0
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12		12		12		12		12	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	101		101		101		101		101	
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2		2		2		2		2	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12		12		12		12		12	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		12		2		12	
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4		4		4		2		2	

4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.920.119.450,0 0		11.099.518.148,0 0		11.151.029.773,0 0		11.203.571.631,0 0		11.257.164.326,0 0
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	101	10.920.119.450,0 0	101	11.099.518.148,0 0	101	11.151.029.773,0 0	101	11.203.571.631,0 0	101	11.257.164.326,0 0
4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			6.614.246,00		6.722.906,00		6.754.106,00		6.785.931,00		6.818.391,00
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	6.614.246,00	12	6.722.906,00	12	6.754.106,00	2	6.785.931,00	12	6.818.391,00
4.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			5.511.871,00		5.602.422,00		5.628.422,00		5.654.942,00		5.681.993,00
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	5.511.871,00	12	5.602.422,00	12	5.628.422,00	12	5.654.942,00	12	5.681.993,00
4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			7.716.620,00		7.843.391,00		7.879.791,00		7.916.919,00		7.954.790,00
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4	7.716.620,00	4	7.843.391,00	4	7.879.791,00	4	7.916.919,00	4	7.954.790,00
4.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan			4.409.497,00		4.481.937,00		4.502.738,00		4.523.954,00		4.545.594,00
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4	4.409.497,00	4	4.481.937,00	4	4.502.738,00	2	4.523.954,00	2	4.545.594,00
4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			73.859.076,00		75.072.453,00		75.420.856,00		75.776.226,00		76.138.705,00
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	73.859.076,00	12	75.072.453,00	12	75.420.856,00	12	75.776.226,00	12	76.138.705,00
4.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			5.511.871,00		5.602.422,00		5.628.422,00		5.654.942,00		5.681.993,00

Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	5.511.871,00	2	5.602.422,00	2	5.628.422,00	2	5.654.942,00	2	5.681.993,00
4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			29.187.462,00		29.666.961,00		29.804.642,00		29.945.077,00		30.088.321,00
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	29.187.462,00	1	29.666.961,00	1	29.804.642,00	1	29.945.077,00	1	30.088.321,00
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		1		1		1	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		1		1		1	
4.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			8.759.157,00		8.903.055,00		8.944.373,00		8.986.518,00		9.029.505,00
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	8.759.157,00	1	8.903.055,00	1	8.944.373,00	1	8.986.518,00	1	9.029.505,00
4.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			14.547.031,00		14.786.014,00		14.854.634,00		14.924.626,00		14.996.019,00
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	14.547.031,00	1	14.786.014,00	1	14.854.634,00	1	14.924.626,00	1	14.996.019,00
4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			5.881.274,00		5.977.892,00		6.005.635,00		6.033.933,00		6.062.797,00
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	5.881.274,00	1	5.977.892,00	1	6.005.635,00	1	6.033.933,00	1	6.062.797,00
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			155.370.240,00		157.922.705,00		158.655.606,00		159.403.166,00		160.165.677,00
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	263	155.370.240,00	263	157.922.705,00	263	158.655.606,00	263	159.403.166,00	263	160.165.677,00
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20		20		20		20		20	
4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			128.873.243,00		130.990.408,00		131.598.319,00		132.218.389,00		132.850.861,00
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	263	128.873.243,00	263	130.990.408,00	263	131.598.319,00	263	132.218.389,00	263	132.850.861,00

4.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			26.496.997,00		26.932.297,00		27.057.287,00		27.184.777,00		27.314.816,00
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	26.496.997,00	20	26.932.297,00	20	27.057.287,00	20	27.184.777,00	20	27.314.816,00
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.658.287.948,00		1.685.530.753,00		1.693.353.115,00		1.701.331.921,00		1.709.470.305,00
Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	1.658.287.948,00	15	1.685.530.753,00	15	1.693.353.115,00	15	1.701.331.921,00	15	1.709.470.305,00
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7		7		7		7		7	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		12		12		12	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12		12		12		12		12	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15		15		15		15		15	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		12		12		12		12	
4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			52.255.848,00		53.114.321,00		53.360.819,00		53.612.247,00		53.868.703,00
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	52.255.848,00	15	53.114.321,00	15	53.360.819,00	15	53.612.247,00	15	53.868.703,00
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			122.942.834,00		124.962.573,00		125.542.510,00		126.134.046,00		126.737.413,00
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	122.942.834,00	7	124.962.573,00	7	125.542.510,00	7	126.134.046,00	7	126.737.413,00
4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor			13.949.115,00		14.178.275,00		14.244.075,00		14.311.191,00		14.379.649,00
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15	13.949.115,00	15	14.178.275,00	15	14.244.075,00	15	14.311.191,00	15	14.379.649,00
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			94.415.492,00		95.966.575,00		96.411.946,00		96.866.223,00		97.329.586,00
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	94.415.492,00	12	95.966.575,00	12	96.411.946,00	12	96.866.223,00	12	97.329.586,00

4.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu			1.219.689.631,00		1.239.727.024,00		1.245.480.459,00		1.251.348.962,00		1.257.334.836,00
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	1.219.689.631,00	12	1.239.727.024,00	12	1.245.480.459,00	12	1.251.348.962,00	12	1.257.334.836,00
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			155.035.028,00		157.581.985,00		158.313.306,00		159.059.252,00		159.820.118,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	155.035.028,00	12	157.581.985,00	12	158.313.306,00	12	159.059.252,00	12	159.820.118,00
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.350.624.235,00		2.389.240.930,00		2.400.329.132,00		2.411.639.097,00		2.423.175.261,00
Terlaksananya Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2.350.624.235,00	1	2.389.240.930,00	1	2.400.329.132,00	1	2.411.639.097,00	1	2.423.175.261,00
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6		6		6		6		6	
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		5		5		5		5	
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		1		1		1	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		1		1		1		1	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2		4		4		4		4	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12		12		12		12		12	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		1		1		1	
4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			220.253.491,00		223.871.875,00		224.910.840,00		225.970.583,00		227.051.522,00
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	220.253.491,00	4	223.871.875,00	4	224.910.840,00	4	225.970.583,00	4	227.051.522,00
4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			277.843.785,00		282.408.278,00		283.718.903,00		285.055.741,00		286.419.316,00
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	277.843.785,00	1	282.408.278,00	1	283.718.903,00	1	285.055.741,00	1	286.419.316,00

4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel			175.356.568,00		178.237.374,00		179.064.553,00		179.908.277,00		180.768.874,00
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6	175.356.568,00	6	178.237.374,00	6	179.064.553,00	6	179.908.277,00	6	180.768.874,00
4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			577.783.437,00		587.275.421,00		590.000.901,00		592.780.890,00		595.616.479,00
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	577.783.437,00	12	587.275.421,00	12	590.000.901,00	12	592.780.890,00	12	595.616.479,00
4.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya			698.840.585,00		710.321.329,00		713.617.851,00		716.980.303,00		720.410.005,00
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	698.840.585,00	5	710.321.329,00	5	713.617.851,00	5	716.980.303,00	5	720.410.005,00
4.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			146.678.952,00		149.088.634,00		149.780.538,00		150.486.280,00		151.206.136,00
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	146.678.952,00	1	149.088.634,00	1	149.780.538,00	1	150.486.280,00	1	151.206.136,00
4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			126.463.584,00		128.541.162,00		129.137.707,00		129.746.183,00		130.366.829,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	126.463.584,00	1	128.541.162,00	1	129.137.707,00	1	129.746.183,00	1	130.366.829,00
4.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			127.403.833,00		129.496.857,00		130.097.839,00		130.710.840,00		131.336.100,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	127.403.833,00	1	129.496.857,00	1	130.097.839,00	1	130.710.840,00	1	131.336.100,00
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.991.608.697,00		3.040.755.659,00		3.054.867.467,00		3.069.261.510,00		3.083.943.435,00
Terlaksananya Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	2.991.608.697,00	12	3.040.755.659,00	12	3.054.867.467,00	12	3.069.261.510,00	12	3.083.943.435,00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		12		12	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		12		12	
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			871.754.774,00		886.076.199,00		890.188.380,00		894.382.804,00		898.661.117,00
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	871.754.774,00	12	886.076.199,00	12	890.188.380,00	12	894.382.804,00	12	898.661.117,00

4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			695.848.183,00		707.279.766,00		710.562.173,00		713.910.227,00		717.325.243,00
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	695.848.183,00	12	707.279.766,00	12	710.562.173,00	12	713.910.227,00	12	717.325.243,00
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.424.005.740,00		1.447.399.694,00		1.454.116.914,00		1.460.968.479,00		1.467.957.075,00
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1.424.005.740,00	12	1.447.399.694,00	12	1.454.116.914,00	12	1.460.968.479,00	12	1.467.957.075,00
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.879.625.209,00		2.926.932.477,00		2.940.516.044,00		2.952.063.195,00		2.968.503.625,00
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	2.879.625.209,00	12	2.926.932.477,00	12	2.940.516.044,00	12	2.952.063.195,00	12	2.968.503.625,00
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12		12		12		12		12	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		1		1	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	12		12		12		12		12	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	38		38		38		38		38	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		6		6		6		6	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	19		19		19		19		19	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		1		1	
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			826.003.829,00		839.573.645,00		843.470.013,00		847.444.308,00		851.498.089,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	19	826.003.829,00	19	839.573.645,00	19	843.470.013,00	19	847.444.308,00	19	851.498.089,00

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			706.389.418,00		717.994.176,00		721.326.307,00		724.725.080,00		728.191.829,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	38	706.389.418,00	38	717.994.176,00	38	721.326.307,00	38	724.725.080,00	38	728.191.829,00
4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel			15.163.471,00		15.412.581,00		15.484.109,00		15.557.068,00		15.631.485,00
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	12	15.163.471,00	12	15.412.581,00	12	15.484.109,00	12	15.557.068,00	12	15.631.485,00
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			206.672.852,00		210.068.130,00		211.043.032,00		212.037.433,00		213.051.722,00
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	206.672.852,00	12	210.068.130,00	12	211.043.032,00	12	212.037.433,00	12	213.051.722,00
4.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			102.704.814,00		104.392.077,00		104.876.549,00		105.370.710,00		105.874.755,00
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	102.704.814,00	12	104.392.077,00	12	104.876.549,00	12	105.370.710,00	12	105.874.755,00
4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			479.704.878,00		487.585.600,00		489.848.431,00		489.848.431,00		494.510.766,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	479.704.878,00	6	487.585.600,00	6	489.848.431,00	6	489.848.431,00	6	494.510.766,00
4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			383.883.829,00		390.190.377,00		392.001.207,00		393.848.253,00		395.732.241,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	383.883.829,00	1	390.190.377,00	1	392.001.207,00	1	393.848.253,00	1	395.732.241,00
4.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			159.102.118,00		161.715.891,00		162.466.396,00		163.231.912,00		164.012.738,00

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	159.102.118,00	1	161.715.891,00	1	162.466.396,00	1	163.231.912,00	1	164.012.738,00
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			651.865.542,00		662.574.567,00		665.649.502,00		668.785.935,00		671.985.096,00
Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	651.865.542,00	2	662.574.567,00	2	665.649.502,00	2	668.785.935,00	2	671.985.096,00
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	8		8		8		8		8	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	10		10		10		10		10	
	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		2		2		2		2	
4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			158.704.050,00		161.311.283,00		162.059.911,00		162.823.511,00		163.602.383,00
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	158.704.050,00	2	161.311.283,00	2	162.059.911,00	2	162.823.511,00	2	163.602.383,00
4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			130.097.817,00		132.235.099,00		132.848.788,00		133.474.750,00		134.113.231,00
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	10	130.097.817,00	10	132.235.099,00	10	132.848.788,00	10	133.474.750,00	10	134.113.231,00
4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			44.586.767,00		45.319.251,00		45.529.572,00		45.744.100,00		45.962.919,00
Tertaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	8	44.586.767,00	8	45.319.251,00	8	45.529.572,00	8	45.744.100,00	8	45.962.919,00
4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			318.476.908,00		323.708.934,00		325.211.231,00		326.743.574,00		328.306.563,00

Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	318.476.908,00	2	323.708.934,00	2	325.211.231,00	2	326.743.574,00	2	328.306.563,00
4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			1.372.252.687,00		1.394.796.427,00		1.401.269.521,00		1.407.872.079,00		1.414.606.685,00
Terlaksananya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	40	1.372.252.687,00	40	1.394.796.427,00	40	1.401.269.521,00	40	1.407.872.079,00	40	1.414.606.685,00
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	40		40		40		40		40	
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	40		40		40		40		40	
4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			541.345.638,00		550.239.011,00		552.792.609,00		555.397.279,00		558.054.042,00
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	40	541.345.638,00	40	550.239.011,00	40	552.792.609,00	40	555.397.279,00	40	558.054.042,00
4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			522.162.429,00		530.740.655,00		533.203.763,00		535.716.134,00		538.278.751,00
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	40	522.162.429,00	40	530.740.655,00	40	533.203.763,00	40	535.716.134,00	40	538.278.751,00
4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			308.744.620,00		313.816.761,00		315.273.149,00		316.758.666,00		318.273.892,00
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	40	308.744.620,00	40	313.816.761,00	40	315.273.149,00	40	316.758.666,00	40	318.273.892,00
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi			316.486.449,00		321.685.774,00		323.178.681,00		324.701.449,00		326.254.669,00
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	316.486.449,00	1	321.685.774,00	1	323.178.681,00	1	324.701.449,00	1	326.254.669,00
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1		1		1		1		1	

	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	1		1		1		1		1	
4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			52.139.489,00		52.996.051,00		53.242.000,00		53.492.868,00		53.748.753,00
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	1	52.139.489,00	1	52.996.051,00	1	53.242.000,00	1	53.492.868,00	1	53.748.753,00
4.01.01.2.13.0002 - Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			56.767.011,00		57.699.595,00		57.967.372,00		58.240.505,00		58.519.100,00
Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	1	56.767.011,00	1	57.699.595,00	1	57.967.372,00	1	58.240.505,00	1	58.519.100,00
4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			90.793.207,00		92.284.782,00		92.713.065,00		93.149.915,00		93.595.501,00
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	90.793.207,00	1	92.284.782,00	1	92.713.065,00	1	93.149.915,00	1	93.595.501,00
4.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			52.517.101,00		53.379.866,00		53.627.596,00		53.880.281,00		54.138.019,00
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	1	52.517.101,00	1	53.379.866,00	1	53.627.596,00	1	53.880.281,00	1	54.138.019,00
4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			64.269.641,00		65.325.480,00		65.628.648,00		65.937.880,00		66.253.296,00
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	64.269.641,00	1	65.325.480,00	1	65.628.648,00	1	65.937.880,00	1	66.253.296,00
4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			1.314.286.393,00		1.335.877.851,00		1.342.077.508,00		1.350.709.249,00		1.354.851.290,00
Terlaksananya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	72	1.314.286.393,00	84	1.335.877.851,00	26	1.342.077.508,00	96	1.350.709.249,00	108	1.354.851.290,00
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan (Laporan)	22		24		26		28		30	
	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	130		140		150		160		170	
4.01.01.2.14.0001 - Fasilitas Keprotokolan			235.049.906,00		238.911.370,00		240.020.131,00		241.563.850,00		242.304.623,00
Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan (Laporan)	22	235.049.906,00	24	238.911.370,00	26	240.020.131,00	28	241.563.850,00	30	242.304.623,00
4.01.01.2.14.0002 - Fasilitas Komunikasi Pimpinan			762.998.336,00		775.533.083,00		779.132.243,00		784.143.331,00		786.547.959,00

Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	72	762.998.336,00	84	775.533.083,00	26	779.132.243,00	96	784.143.331,00	108	786.547.959,00
4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan			316.238.151,00		321.433.398,00		322.925.134,00		325.002.068,00		325.998.708,00
Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	130	316.238.151,00	140	321.433.398,00	150	322.925.134,00	160	325.002.068,00	170	325.998.708,00
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			4.807.838.353,67		4.886.822.831,98		4.909.502.031,40		4.932.634.814,81		4.956.230.253,89
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan, Politik, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	4.807.838.353,67	100	4.886.822.831,98	100	4.909.502.031,40	100	4.932.634.814,81	100	4.956.230.253,89
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan			641.293.203,00		651.828.542,00		654.853.606,00		657.939.170,00		661.086.446,00
Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Tata Pemerintahan.	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	86	641.293.203,00	86	651.828.542,00	86	654.853.606,00	86	657.939.170,00	86	661.086.446,00
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	1		1		1		1		1	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	43		43		43		43		43	
4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan			201.686.713,00		205.000.076,00		205.951.460,00		206.921.869,00		207.911.687,00
Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	1	201.686.713,00	1	205.000.076,00	1	205.951.460,00	1	206.921.869,00	1	207.911.687,00
4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			127.232.571,00		129.322.783,00		129.922.955,00		130.535.131,00		131.159.551,00
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	1	127.232.571,00	1	129.322.783,00	1	129.922.955,00	1	130.535.131,00	1	131.159.551,00
4.01.02.2.01.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah			184.756.572,00		187.791.803,00		188.663.324,00		189.552.275,00		190.459.005,00
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	1	184.756.572,00	1	187.791.803,00	1	188.663.324,00	1	189.552.275,00	1	190.459.005,00

4.01.02.2.01.0004 - Fasilitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			70.862.899,00		72.027.054,00		72.361.323,00		72.702.278,00		73.050.052,00
Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	43	70.862.899,00	43	72.027.054,00	43	72.361.323,00	43	72.702.278,00	43	73.050.052,00
4.01.02.2.01.0005 - Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			56.754.448,00		57.686.826,00		57.954.544,00		58.227.617,00		58.506.151,00
Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	86	56.754.448,00	86	57.686.826,00	86	57.954.544,00	86	58.227.617,00	86	58.506.151,00
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			3.292.141.751,00		3.346.225.954,00		3.361.755.415,00		3.377.595.466,00		3.393.752.317,00
Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	4	3.292.141.751,00	4	3.346.225.954,00	4	3.361.755.415,00	4	3.377.595.466,00	4	3.393.752.317,00
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	45		45		45		45		45	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	55		55		55		55		55	

	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	3		3		3		3		3	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4		4		4		4		4	
4.01.02.2.02.0001 - Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual			2.856.262.184,00		2.903.185.638,00		2.916.658.998,00		2.930.401.827,00		2.944.419.510,00
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4	2.856.262.184,00	4	2.903.185.638,00	4	2.916.658.998,00	4	2.930.401.827,00	4	2.944.419.510,00
4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			91.192.326,00		92.690.459,00		93.120.625,00		93.559.394,00		94.006.939,00
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	4	91.192.326,00	4	92.690.459,00	4	93.120.625,00	4	93.559.394,00	4	94.006.939,00
4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat			219.915.069,00		223.527.894,00		224.565.262,00		225.623.377,00		226.702.655,00
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	3	219.915.069,00	3	223.527.894,00	3	224.565.262,00	3	225.623.377,00	3	226.702.655,00
4.01.02.2.02.0004 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			62.221.479,00		63.243.670,00		63.537.177,00		63.836.554,00		64.141.919,00

Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	55	62.221.479,00	55	63.243.670,00	55	63.537.177,00	55	63.836.554,00	55	64.141.919,00
4.01.02.2.02.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			62.550.693,00		63.578.293,00		63.873.353,00		64.174.314,00		64.481.294,00
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	45	62.550.693,00	45	63.578.293,00	45	63.873.353,00	45	64.174.314,00	45	64.481.294,00
4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			761.234.010,00		773.739.769,00		777.330.609,00		780.993.266,00		784.729.176,00
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	4	761.234.010,00	3	773.739.769,00	3	777.330.609,00	3	780.993.266,00	3	784.729.176,00
	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	3		2		2		2		2	
	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	500		530		580		600		700	
4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			85.155.826,00		86.554.789,00		86.956.480,00		87.366.205,00		87.784.124,00
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	4	85.155.826,00	3	86.554.789,00	3	86.956.480,00	3	87.366.205,00	3	87.784.124,00
4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum			506.465.290,00		514.785.639,00		517.174.702,00		519.611.546,00		522.097.127,00
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	3	506.465.290,00	2	514.785.639,00	2	517.174.702,00	2	519.611.546,00	2	522.097.127,00
4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			169.612.894,00		172.399.341,00		173.199.427,00		174.015.515,00		174.847.925,00
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	500	169.612.894,00	530	172.399.341,00	580	173.199.427,00	600	174.015.515,00	700	174.847.925,00
4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah			113.169.389,67		115.028.566,98		115.562.401,40		116.106.912,81		116.662.314,89
Terlaksananya Kerjasama antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	5	113.169.389,67	5	115.028.566,98	5	115.562.401,40	5	116.106.912,81	5	116.662.314,89

	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	10		10		10		10		10	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	5		5		5		5		5	
4.01.02.2.04.0001 - Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri			43.626.800,67		44.343.512,98		44.549.306,40		44.759.214,81		44.973.322,89
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	5	43.626.800,67	5	44.343.512,98	5	44.549.306,40	5	44.759.214,81	5	44.973.322,89
4.01.02.2.04.0002 - Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri			21.275.845,00		21.625.370,00		21.725.731,00		21.828.100,00		21.932.515,00
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	5	21.275.845,00	5	21.625.370,00	5	21.725.731,00	5	21.828.100,00	5	21.932.515,00
4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			48.266.744,00		49.059.684,00		49.287.364,00		49.519.598,00		49.756.477,00
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	10	48.266.744,00	10	49.059.684,00	10	49.287.364,00	10	49.519.598,00	10	49.756.477,00
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			2.042.949.129,14		2.076.511.254,00		2.086.148.111,01		2.095.977.705,15		2.106.003.891,18
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian, Pembangunan, Sumber Daya Alam, dan Pengadaan Barang Jasa (Persentase)	100	2.042.949.129,14	100	2.076.511.254,00	100	2.086.148.111,01	100	2.095.977.705,15	100	2.106.003.891,18
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			819.631.191,08		833.096.315,00		836.962.622,01		840.906.255,15		844.928.761,18
Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)	1	819.631.191,08	1	833.096.315,00	1	836.962.622,01	1	840.906.255,15	1	844.928.761,18
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen)	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	1		1		1		1		1	

	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	1		1		1		1		1	
4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			273.756.818,08		278.254.169,00		279.545.516,01		280.862.689,15		282.206.206,18
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	1	273.756.818,08	1	278.254.169,00	1	279.545.516,01	1	280.862.689,15	1	282.206.206,18
4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			213.022.146,00		216.521.732,00		217.526.585,00		218.551.536,00		219.596.985,00
Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	1	213.022.146,00	1	216.521.732,00	1	217.526.585,00	1	218.551.536,00	1	219.596.985,00
4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			212.858.220,00		216.355.113,00		217.359.193,00		218.383.355,00		219.427.999,00
Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	1	212.858.220,00	1	216.355.113,00	1	217.359.193,00	1	218.383.355,00	1	219.427.999,00
4.01.03.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD			50.325.355,00		51.152.114,00		51.389.505,00		51.631.644,00		51.878.626,00
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen)	1	50.325.355,00	1	51.152.114,00	1	51.389.505,00	1	51.631.644,00	1	51.878.626,00
4.01.03.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD			28.687.092,00		29.158.371,00		29.293.692,00		29.431.719,00		29.572.507,00
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)	1	28.687.092,00	1	29.158.371,00	1	29.293.692,00	1	29.431.719,00	1	29.572.507,00
4.01.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)			40.981.560,00		41.654.816,00		41.848.131,00		42.045.312,00		42.246.438,00
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)	1	40.981.560,00	1	41.654.816,00	1	41.848.131,00	1	42.045.312,00	1	42.246.438,00
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			508.081.448,06		516.428.349,00		518.825.035,00		521.269.655,00		523.763.168,00
Indeks Pengelolaan Program Pembangunan secara Kuantitatif maupun Kualitatif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	2	508.081.448,06	2	516.428.349,00	2	518.825.035,00	2	521.269.655,00	2	523.763.168,00

	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	2		2		2		2		2	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	3		3		3		3		3	
4.01.03.2.02.0001 - Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan			203.232.579,06		206.571.339,00		207.530.014,00		208.507.862,00		209.505.267,00
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	2	203.232.579,06	2	206.571.339,00	2	207.530.014,00	2	208.507.862,00	2	209.505.267,00
4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			169.343.547,00		172.125.569,00		172.924.384,00		173.739.176,00		174.570.264,00
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	2	169.343.547,00	2	172.125.569,00	2	172.924.384,00	2	173.739.176,00	2	174.570.264,00
4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			135.505.322,00		137.731.441,00		138.370.637,00		139.022.617,00		139.687.637,00
Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	3	135.505.322,00	3	137.731.441,00	3	138.370.637,00	3	139.022.617,00	3	139.687.637,00
4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			603.895.763,00		613.816.727,00		616.665.382,00		619.571.010,00		622.534.750,00
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	25	603.895.763,00	25	613.816.727,00	25	616.665.382,00	25	619.571.010,00	25	622.534.750,00
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	12		12		12		12		12	
	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	12		12		12		12		12	
4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			241.558.305,00		245.526.691,00		246.666.153,00		247.828.404,00		249.013.900,00
Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	12	241.558.305,00	12	245.526.691,00	12	246.666.153,00	12	247.828.404,00	12	249.013.900,00
4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			201.278.458,00		204.585.115,00		205.534.572,00		206.503.018,00		207.490.832,00
Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	12	201.278.458,00	12	204.585.115,00	12	205.534.572,00	12	206.503.018,00	12	207.490.832,00

4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			161.059.000,00		163.704.921,00		164.464.657,00		165.239.588,00		166.030.018,00
Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	25	161.059.000,00	25	163.704.921,00	25	164.464.657,00	25	165.239.588,00	25	166.030.018,00
4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			111.340.727,00		113.169.863,00		113.695.072,00		114.230.785,00		114.777.212,00
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	1	111.340.727,00	1	113.169.863,00	1	113.695.072,00	1	114.230.785,00	1	114.777.212,00
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	1		1		1		1		1	
4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			44.536.291,00		45.267.945,00		45.478.029,00		45.692.314,00		45.910.885,00
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	1	44.536.291,00	1	45.267.945,00	1	45.478.029,00	1	45.692.314,00	1	45.910.885,00
4.01.03.2.04.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			37.109.864,00		37.719.515,00		37.894.568,00		38.073.121,00		38.255.245,00
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	1	37.109.864,00	1	37.719.515,00	1	37.894.568,00	1	38.073.121,00	1	38.255.245,00

4.01.03.2.04.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			29.694.572,00		30.182.403,00		30.322.475,00		30.465.350,00		30.611.082,00
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	1	29.694.572,00	1	30.182.403,00	1	30.322.475,00	1	30.465.350,00	1	30.611.082,00

4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki peran strategis dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah. Subkegiatan yang dilaksanakan difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas layanan administrasi, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta peningkatan sinergi antar OPD. Beberapa uraian subkegiatan yang mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah dijabarkan lebih rinci pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Uraian Subkegiatan

No.	Sub Kegiatan
1	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
5	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
10	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah
11	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
15	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
17	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
18	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
19	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

20	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
21	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
22	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
23	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
24	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
25	Penyediaan Komponen Instalasi
26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
27	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
28	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
29	Fasilitasi Kunjungan Tamu
30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
31	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
33	Pengadaan Mebel
34	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
35	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
36	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
37	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
38	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
39	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
40	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
41	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
42	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
43	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
44	Pemeliharaan Mebel
45	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
46	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
47	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
48	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
49	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

50	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
51	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
52	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
53	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
54	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
55	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
56	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
57	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
58	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
59	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
60	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
61	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
62	Fasilitasi Keprotokolan
63	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
64	Pendokumentasian Tugas Pimpinan
65	Penataan Administrasi Pemerintahan
66	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
67	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
68	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
69	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
70	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
71	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
72	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
73	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
74	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
75	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
76	Fasilitasi Bantuan Hukum
77	Pendokumentasian Produk Hukum dan
78	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

79	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
80	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
81	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
82	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
83	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
84	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD
85	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD
86	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
87	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
88	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
89	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
90	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
91	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
92	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
93	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
94	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
95	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025–2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat utama untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD 2025–2029. IKU disusun berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah serta diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. IKU menunjukkan keberhasilan organisasi dalam mencapai *outcome* strategis dan menjadi dasar akuntabilitas kinerja serta pengambilan keputusan.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai LPPD	Indeks	3	3,115	3,2	3,215	3,225	3,3
2	Nilai Rata-Rata SAKIP OPD	Nilai	73	74	76	77	79	80
3	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,44	3,47	3,51	3,54	3,58	3,60
4	Nilai SAKIP OPD	Nilai	73	74	76	77	79	80
5	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	87,05	87,64	88,23	88,82	89,41	90,00

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025–2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Kunci (IKK) ditetapkan sebagai ukuran pokok keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan difasilitasi oleh Sekretariat Daerah. IKK bersifat lebih teknis dan operasional dibandingkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena secara langsung mengukur pencapaian target yang berkaitan dengan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah. Melalui IKK, dapat dipantau efektivitas pelaksanaan fungsi fasilitasi, koordinasi, administrasi, serta dukungan pelayanan bagi perangkat daerah dan pimpinan daerah. Dengan demikian, IKK menjadi instrumen penting dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama periode Renstra 2025–2029.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan, Politik, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian, Pembangunan, Sumber Daya Alam, dan Pengadaan Barang Jasa	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2025-2029 menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh penerapan kaidah perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang konsisten serta berkesinambungan. Rumusan substansi dalam Renstra ini menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai kewenangan, sekaligus memastikan program dan kegiatan tetap selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan jangka menengah daerah.

Renstra Sekretariat Daerah 2025 -2029 diharapkan menjadi instrumen strategis untuk menggerakkan pembangunan yang efektif, adaptif, dan akuntabel. Melalui pengendalian dan evaluasi yang sistematis, capaian kinerja dapat diukur sekaligus menjadi dasar perbaikan kebijakan berkelanjutan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya menjadi acuan teknis, tetapi juga sarana untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendorong terwujudnya kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Muara Sabak, 11 November 2025
Sekretaris Daerah,



H. Sapril, S.IP.